

GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU

Selphi Afdayati Dwi Putri^{1(a)}, Meyzi Heriyanto^{2(b)}, Hasim As'ari^{3(c)}

^{1,2,3}Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Riau

^{a)}selphiafd@gmail.com, ^{b)}meyzi.heriyanto@lecturer.unri.ac.id, ^{c)}hasimasari@lecturer.unri.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

07-11-2024

Diterbitkan Online:

31-12-2024

Kata Kunci:

Good Environmental Governance, Pengelolaan Sampah, Kota Pekan Baru

Keywords:

Good Environmental Governance, Waste Management, Pekan Baru City

Corresponding Author:

selphiafd@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi Kota Pekanbaru sebagai pusat pertumbuhan populasi yang tinggi di Provinsi Riau. Pertumbuhan ini menimbulkan berbagai masalah, salah satunya peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari. Mengingat keterbatasan kemampuan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, diperlukan pendekatan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi penerapan *good environmental governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Konsep teori yang peneliti gunakan adalah teori *good environmental governance* oleh Belbase dengan tujuh indikator, yaitu aturan hukum; partisipasi dan representasi; akses terhadap informasi; transparansi dan akuntabilitas; desentralisasi; lembaga dan institusi; akses untuk memperoleh keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif berdasarkan pada filsafat postpositivisme. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi sumber data. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu: kondensasi data, dilakukan dengan cara memilih informan; penyajian data, menyajikan data melalui uraian singkat masing-masing informan; terakhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru belum memenuhi prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru seperti perubahan kebijakan pengelolaan sampah, ketidakpedulian terhadap lingkungan dan kebijakan, terakhir belum terdapat sistem pengelolaan sampah terstruktur.

ABSTRACT

This research is motivated by the high population growth in Pekanbaru City, Riau Province. This growth has led to various issues, one of which is the daily increase in waste generation. Considering Pekanbaru's limited waste management capacity, a sustainable and environmentally conscious approach is necessary. This study aims to analyze and explore the application of good environmental governance in waste management in Pekanbaru City and to identify the challenges faced. The theoretical framework used is Belbase's good environmental governance theory, which includes seven indicators: rule of law, participation and representation, access to information, transparency and accountability, decentralization, institutions and organizations, and access to justice. The research employs a qualitative approach based on postpositivist philosophy, using data triangulation for data collection. Data analysis in this research involves three stages: data condensation, which is done by selecting key informants; data presentation, which summarizes responses from each informant; and conclusion drawing. The findings indicate that waste management in Pekanbaru City does not yet meet the principles of Good Environmental Governance. The challenges

include policy changes, lack of environmental awareness, and the absence of a structured waste management system.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i4.1109>

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru tidak sekadar sebuah kota di Provinsi Riau, tetapi juga sebagai pemegang peran yang sangat luar biasa dalam menarik perhatian penduduk dari berbagai penjuru. Statusnya sebagai pusat pertumbuhan populasi yang memberikan dampak besar di wilayah Provinsi Riau menjadi pemicu utama ketertarikan tersebut. Ketika semakin banyak orang yang memilih untuk tinggal di Kota Pekanbaru, ada dinamika sosial yang menarik untuk dipelajari. Selama periode tiga tahun terakhir, yang dimulai dari tahun 2021 yang lalu hingga saat ini, telah terjadi perkembangan yang sangat mencolok dalam pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru ini. Pertumbuhan pesat di Kota Pekanbaru dapat menciptakan perubahan lingkungan kota, dari kepadatan penduduk tersebut diiringi dengan sejumlah permasalahan yang timbul. Bahwasanya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cepat diidentifikasi sebagai akar penyebab dari konfigurasi risiko bencana (Wisner et al., 1994).

Salah satu tantangan utama yang muncul seiring dengan peningkatan populasi adalah sampah. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, terjadi peningkatan drastis dalam jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya di Kota Pekanbaru. Pengelolaan sampah sementara ini dipandang hanya sebagai tanggungjawab pemerintah semata. Masyarakat lebih berperan hanya sebagai pihak yang dilayani, karena mereka merasa sudah cukup hanya dengan membayar uang retribusi sampah sehingga penanganannya selanjutnya adalah menjadi tanggungjawab pemerintah (Novalita et al., 2018).

Berdasarkan grafik 1, dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 terdapat tiga wilayah di Provinsi Riau yang memiliki timbulan sampah melebihi 100,000.00 ton, yaitu Kabupaten Rokan Hilir dengan jumlah 123,878.45 ton, Kabupaten Rokan Hulu dengan 137,732.69 ton, dan Kota Pekanbaru dengan jumlah tertinggi mencapai 369,019.82 ton. Angka-angka ini menunjukkan adanya perbedaan besar dalam produksi sampah antar daerah tersebut, dengan Kota Pekanbaru memproduksi hampir tiga kali lipat lebih banyak sampah dibandingkan dengan Kabupaten Rokan Hilir. Pemilihan tiga wilayah dengan timbulan sampah terbesar ini dilakukan untuk menyoroti daerah-daerah yang menghadapi tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah.

Perbandingan ini menyoroti dengan jelas bahwa tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kota Pekanbaru tidak hanya berdampak pada peningkatan drastis dalam produksi sampah, tetapi juga secara dramatis melampaui jumlah sampah yang dihasilkan oleh kabupaten atau kota sekitarnya. Permasalahan seputar sampah terus menjadi tantangan yang membutuhkan solusi mendalam di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan artikel dari Turnip, WM (2023) diakses pada 7 Mei 2024 dari www.Riauonline.co.id, peningkatan volume sampah yang dihasilkan oleh populasi yang terus berkembang menghadirkan tiga isu krusial, yakni tumpukan sampah, sampah yang tersebar di pinggir jalan, dan sampah yang menghambat saluran drainase. Hal ini menunjukkan urgensi untuk merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan strategi terpadu guna mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan di tengah pertumbuhan dinamis Kota Pekanbaru. Situasi ini menekankan perlunya langkah-langkah konkret dan kolaboratif dalam menangani dampak dari pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan kota.

Melihat kemampuan pengelolaan sampah Kota Pekanbaru yang kurang dan melihat persoalan sampah yang menjadi masalah global, maka diperlukan pengelolaan dan kebijakan pengelolaan sampah yang



Gambar 1. Timbulan Sampah Tertinggi Di Provinsi Riau Tahun 2023

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 2024 (Grafik olahan peneliti)

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Bahwa salah satu konsep pengelolaan lingkungan hidup yang berkembang saat ini adalah konsep *Good Environmental Governance*, yang mana sejak tahun 2014, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup) Indonesia telah mengamanatkan penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* (GEG) kepada semua daerah di Indonesia (Nugroho et al., 2015). GEG merupakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa kebijakan, regulasi, dan praktik-praktik yang berkaitan dengan lingkungan hidup dijalankan dengan baik, transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. Prinsip *Good Environmental Governance* adalah dalam melaksanakan azas-azas penyelenggaraan negara yang baik maka diperlukan mengelola lingkungan dengan berpedoman keberlanjutan sumber daya (Siahaan, 2004).

Penelitian *Good Environmental Governance* telah banyak dilakukan, seperti yang dilakukan oleh (Baidawi et al., 2021), (Salihi et al., 2024), (Nugroho et al., 2023), (Fitri et al., 2021), (Wang et al., 2024) dan (Yolanda et al., 2023). Dari berbagai hasil penelitian telah menggambarkan konsep *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di berbagai lokasi penelitian, disimpulkan bahwa diperlukan pendekatan yang menyeluruh untuk merancang strategi yang efektif guna mencapai hasil yang optimal. Dalam hal ini, perbedaan yang terlihat dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa setiap lokasi memiliki dinamika dan tantangan yang berbeda baik dalam segi peraturan pemerintah, permasalahan di sosialisasi, pihak sektor, pengelolaan dan berbagai faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah. Penelitian ini meneliti konteks spesifik Kota Pekanbaru, yang memiliki karakteristik unik sebagai tingkat urbanisasi yang tinggi dan tantangan lingkungan yang signifikan. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah dengan memberikan analisis mendalam mengenai prinsip *Good Environmental Governance* dan kendala dalam menghadapi pengelolaan sampah yang ada.

Selain persoalan sampah yang belum dikelola dengan baik di Kota Pekanbaru, adanya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengelola sampah berwawasan lingkungan menjadi alasan penulis untuk meneliti

bagaimana *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru menuju *Good Environmental Governance*.

Dalam sebuah penelitian tentunya harus memiliki tujuan guna untuk memperkuat alasan meneliti sebuah masalah tersebut. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mengeksplanasi *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dan mengidentifikasi kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru menuju *Good Environmental Governance*.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretif. Jenis dan sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan secara triangulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Tempat penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan waktu penelitian pada bulan Agustus 2024. Informan kunci dalam penelitian ini sebanyak enam orang yang terdiri dari Kepala Bidang pengelolaan sampah dan kebersihan Kota Pekanbaru, Koordinator Lapangan pengelolaan sampah dan kebersihan Kota Pekanbaru, Koordinator Lapangan PT. BRS, Akademisi Lingkungan Kota Pekanbaru, Media Kota Pekanbaru dan Masyarakat Kota Pekanbaru. Dengan memilih informan-informan ini, penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dari berbagai sudut pandang pemerintah, swasta, ahli, media, dan masyarakat. Informan kunci dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat saling bersinergi dan bekerjasama dalam *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Data untuk melakukan analisis atas fakta-fakta yang ditemukan dilapangan, dilakukan langkah-langkah dengan menggunakan Model Interaktif teori (Miles, Huberman & Saldana, 2014). Dalam penelitian ini, ada tiga tahap proses analisis data: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingginya peningkatan sampah yang ada di Kota Pekanbaru menjadi sebuah masalah yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan yang baik atau *Good Environmental Governance*, selain itu adanya peningkatan dalam timbulan sampah di banding penanganan dan pengurangan sampah, serta penyelesaian masalah sampah yang belum optimal. Dengan ini peneliti ingin mengetahui *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah dengan menggunakan teori menurut Belbase (2010). Berikut penelitian yang telah dilaksanakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan mengenai *Good Environmental Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru.

Aturan Hukum (*The Rule of Law*)

Indikator aturan hukum di dalam pengelolaan sampah ini sangat penting untuk menciptakan dasar yang kuat dalam menegakkan ketertiban dan kepatuhan di lapangan, baik dari pihak masyarakat maupun pemerintah. Berdasarkan hasil dari teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, meskipun Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerbitkan berbagai peraturan daerah dan sanksi untuk menindak pelanggaran dalam pengelolaan sampah, penerapannya di lapangan masih menghadapi kendala. Kebijakan terkait pengelolaan sampah tidak selalu diikuti dengan langkah-langkah penegakan hukum yang konsisten. Sanksi yang sudah ada, misalnya, tidak diterapkan secara tegas atau terintegrasi, sehingga perilaku masyarakat dalam membuang sampah sembarangan masih menjadi masalah yang sulit dikendalikan.

Walaupun sudah ada dasar hukum yang cukup kuat, pelaksanaan aturan hukum ini memerlukan penguatan lebih lanjut agar dapat mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, upaya menciptakan lingkungan bersih melalui tata kelola yang baik akan sulit tercapai. Dengan demikian, indikator ini menunjukkan bahwa aturan hukum belum berhasil diterapkan secara optimal di lapangan dan masih membutuhkan pengawasan yang lebih tinggi untuk dapat berdampak nyata dalam pengelolaan sampah.

Partisipasi dan Representasi (*Participation and representation*)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru telah melibatkan

masyarakat dan struktur lokal seperti RT dan RW dalam beberapa program dan kegiatan pengelolaan sampah. Namun, keterlibatan ini belum sepenuhnya optimal karena masih bersifat tidak konsisten dan tidak terkoordinasi secara rutin. Untuk meningkatkan keberhasilan pengelolaan sampah, perlu adanya mekanisme yang lebih terstruktur, seperti pertemuan rutin atau forum diskusi yang melibatkan semua pihak terkait.

Dengan adanya keterlibatan dan representasi yang lebih nyata, maka permasalahan yang muncul dapat diatasi bersama, dan kebijakan yang diterapkan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan. Kesimpulannya, indikator ini belum sepenuhnya tercapai karena keterlibatan dan representasi masyarakat belum terlaksana secara konsisten dan mendalam.

Akses Terhadap Informasi (*Access to Information*)

DLHK Kota Pekanbaru telah menyediakan beberapa platform untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, seperti melalui website dan media sosial. Akan tetapi, beberapa informasi penting terkait pengelolaan sampah, seperti data timbulan sampah dan jadwal pengangkutan, belum dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui platform tersebut. Hal ini mengakibatkan masyarakat dan peneliti yang memerlukan informasi spesifik masih harus mengajukan permintaan langsung ke DLHK. Kurangnya akses informasi yang mudah dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah, karena mereka tidak memiliki data dan informasi yang lengkap.

Oleh karena itu, meskipun DLHK telah berupaya menyediakan akses informasi, indikator ini belum sepenuhnya berhasil karena keterbatasan dalam ketersediaan dan penyebaran informasi yang merata kepada seluruh masyarakat. Untuk memenuhi indikator ini dengan baik, perlu dilakukan perbaikan dalam penyediaan data yang lebih komprehensif dan akses yang lebih mudah bagi publik.

Transparansi dan Akuntabilitas (*Transparency and Accountability*)

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sampah merupakan dua elemen kunci untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang diambil dapat diakses dan

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Berdasarkan data dan hasil wawancara, DLHK Kota Pekanbaru berupaya mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk menyampaikan kebijakan dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah. Namun, pertemuan ini tidak dilakukan secara rutin dan lebih bersifat insidental, yaitu hanya ketika muncul isu atau masalah yang mendesak. Kurangnya forum atau pertemuan rutin ini membuat masyarakat sering kali kurang mendapatkan informasi yang jelas mengenai kebijakan atau tindakan yang diambil oleh DLHK.

Hal ini menunjukkan bahwa indikator transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya berhasil, karena masyarakat membutuhkan keterbukaan yang lebih tinggi agar dapat memahami kebijakan yang ada dan memberi dukungan yang dibutuhkan. Untuk mencapai indikator ini, diperlukan peningkatan dan keterbukaan pertemuan, serta dokumentasi yang lebih jelas mengenai setiap tindakan yang diambil dalam pengelolaan sampah.

Desentralisasi (*Decentralitation*)

Desentralisasi dalam pengelolaan sampah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk lebih berdaya dalam menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Di Kota Pekanbaru, desentralisasi memungkinkan DLHK bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan operasional pengelolaan sampah, seperti pembangunan TPS sementara. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi ini masih menghadapi kendala di lapangan, terutama dalam hal koordinasi antara DLHK dan pemerintah kecamatan. DLHK sering kali mengandalkan tenaga dari kecamatan untuk membantu pelaksanaan operasional sampah dan kecamatan sering kali kesulitan menjalankan tugas ini dengan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa indikator desentralisasi belum sepenuhnya tercapai, karena pelaksanaan di lapangan masih membutuhkan penguatan dalam hal sumber daya dan koordinasi. Desentralisasi yang ideal seharusnya memberikan wewenang yang memadai bagi kecamatan untuk mengelola sampah di wilayah masing-masing, namun hal ini belum sepenuhnya terwujud.

Lembaga dan Institusi (*Institutions and Agencies*)

Kolaborasi antar lembaga dalam pengelolaan sampah, baik itu antara DLHK, pemerintah kecamatan, maupun sektor swasta, merupakan elemen penting dalam mencapai keberhasilan *good environmental governance* yang efektif. Berdasarkan data, DLHK Kota Pekanbaru telah melibatkan berbagai lembaga, termasuk sektor swasta seperti PT. BRS yang bertugas dalam operasional pengangkutan sampah. Namun, koordinasi antara lembaga-lembaga ini cenderung tidak terstruktur dan sering kali bersifat otomatis terhadap masalah yang muncul di lapangan.

Dengan demikian, indikator ini menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga dan institusi dalam pengelolaan sampah masih perlu diperkuat melalui kerja sama yang lebih terstruktur dan mendalam, agar setiap lembaga dapat memberikan kontribusi yang dalam untuk pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Akses untuk Memperoleh Keadilan (*Access to Justice*)

DLHK telah menyediakan *call center* sebagai saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan laporan terkait masalah sampah. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan dalam proses penetapan tarif pengelolaan sampah melalui konsultasi dengan DPR dan Biro Hukum, yang menunjukkan adanya komitmen untuk melibatkan suara masyarakat dalam kebijakan yang diambil. Namun, meskipun mekanisme pengaduan sudah ada, proses tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat terkadang tidak berjalan dengan lancar.

Secara keseluruhan, meskipun indikator akses untuk memperoleh keadilan telah berhasil dibangun dengan adanya sistem pengaduan dan keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan tarif, namun pelaksanaannya masih memerlukan penguatan. Peningkatan dalam kecepatan penanganan serta keterbukaan dalam proses tindak lanjut terhadap keluhan sangat penting untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat, serta mendukung terciptanya *good environmental governance* dalam pengelolaan sampah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dari penelitian yang dilakukan terdapatnya kendala dalam penerapan *good environmental*

governance dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

a) Perubahan Kebijakan Pengelolaan Sampah

Dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah ada berbagai peraturan yang dirumuskan untuk mengatasi masalah sampah, seperti Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014, penerapan kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu isu utama adalah pergeseran dari sistem pengelolaan sampah yang sebelumnya melibatkan masyarakat secara langsung menjadi sistem yang lebih bergantung pada sektor swasta.

b) Ketidakpedulian Terhadap Lingkungan dan Kebijakan

Tingkat kepedulian terhadap lingkungan di Kota Pekanbaru sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan sampah, dan dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran serta kepedulian terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik menjadi salah satu masalah utama dalam membangun lingkungan yang sehat dan bersih. Meskipun pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) telah menetapkan jadwal buang sampah yang jelas dan menyediakan tempat pembuangan sampah (TPS) yang resmi, masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan tidak mematuhi waktu yang telah ditentukan, yang menciptakan penumpukan sampah di berbagai lokasi.

c) Belum Terdapat Sistem Pengelolaan Sampah Terstruktur

Tidak adanya platform khusus pengelolaan sampah ini merupakan kendala dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, di mana dapat disimpulkan bahwa meskipun DLHK telah berusaha menyampaikan informasi melalui berbagai saluran, seperti media sosial dan komunikasi langsung, masih terdapat kekurangan dalam penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Informasi yang tersedia sering kali terbatas pada data umum dan tidak mencakup rincian tentang kebijakan, tata cara pengelolaan sampah, serta jadwal pengangkutan dan lokasi TPS resmi. Minimnya informasi ini menghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan menciptakan

kesenjangan dalam komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

PENUTUP

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru masih menjadi isu yang kompleks. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru belum memenuhi prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* (GEG). Dimana dari tujuh prinsip GEG yaitu aturan hukum; partisipasi dan representasi; akses terhadap informasi; transparansi dan akuntabilitas; desentralisasi; lembaga dan institusi; akses untuk memperoleh keadilan, disetiap prinsipnya belum terpenuhi. Terdapat beberapa kendala dalam penerapan *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru yaitu Perubahan Kebijakan Pengelolaan Sampah; Ketidakpedulian Terhadap Lingkungan dan Kebijakan; dan Belum Terdapat Sistem Pengelolaan Sampah Terstruktur.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian tentang *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di tingkat lokal, khususnya di kota berkembang seperti Pekanbaru. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* sebagai kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan dalam tata kelola lingkungan. Implikasi praktisnya adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan oleh pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, serta sektor swasta untuk memperbaiki mekanisme pengelolaan sampah.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, cakupan penelitian yang berfokus pada Kota Pekanbaru mungkin tidak sepenuhnya mewakili konteks daerah lain dengan tantangan yang berbeda. Kedua, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan tanpa menggali lebih dalam pada perspektif kelompok masyarakat yang kurang terwakili, seperti masyarakat marginal atau pelaku sektor informal.

Dengan demikian, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengatasi keterbatasan tersebut, melalui pendekatan komparatif antar wilayah atau analisis mendalam terhadap pengaruh kebijakan nasional terhadap implementasi di tingkat lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan untuk memperkuat tata kelola pengelolaan sampah

yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis prinsip *Good Environmental Governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Baidawi, A., & Dewi, R. (2021). Sosialisasi Pelestarian Lingkungan Berbasis Konsep *Good Environmental Governance* Di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. *Jurnal Pintar Abdimas*, 1(1), 25-33.
- Belbase, Narayan. (2010). *Good Environmental Governance In The Future Constitution*. Nepal: IUCN.
- Fitri, I. C., & Zuhroh, S. F. (2021). Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19(1), 74-86.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications*. (Tjetjep Rohidi Rohidi, Trans.). UI-Press.
- Novalita, P., Heriyanto, M., & Muchid, M. (2018). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 14(4), 450-455.
- Nugroho, A. H., Setiyono, B., & Sulistyowati. (2015). Evaluasi Prinsip *Good Environmental Governance* (GEG) Dalam Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kendal. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(3), 1-10.
- Nugroho, G. P., Sulistiowati, R., & Caturiani, S. I. (2023). *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Administrativa*, 5(2), 155-162.
- Salihi, A. A., Ibrahim, H., & Baharudin. D. M. (2024). *Environmental governance as a driver of green innovation capacity and firm value creation*. *Innovation and Green Development*. Elsevier, 3(2), 1-13.
- Siahaan, N.H.T. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. (2020). *Timbulan Sampah Tertinggi Di Provinsi Riau Tahun 2023*. Dari <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>.
- Turnip, W. M. (2023, 4 Agustus). *Sampah Menumpuk, Masalah Klasik Yang Menunggu Solusi di Kota Pekanbaru*. Diakses pada 7 Mei 2024, dari https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2023/08/04/sampah-menumpuk-masalah-klasik-yang-menunggu-solusi-di-kota-pekanbaru#google_vignette.
- Wang, L., Li, S., & Lv, Y. (2024). *Influence of local governments on the greening of the manufacturing sector: A perspective on environmental governance objectives*. *Heliyon*, 10(1), ISSN 2405-8440, Elsevier BV.
- Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (1994). *At risk: natural hazards, people's vulnerability, and disasters*. London: Routledge.
- Yolanda, V. Y., & Septianda, M. F. (2023). Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Sampah Pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang Tahun 2023. *Jurnal Pemerintah dan Kebijakan*, 5(1). 17-29.